REVITALISASI ETIKA SOSIAL-POLITIK DALAM HIDUP BERDEMOKRASI

Mateus Mali

Abstract:

Discussion on social-political ethics brings us to understand that democratic system has to give space for the people's participation when a public policy is taken. Democracy or "government by and for the people" requires some form of representation and must bring the people to the welfare society. Welfare society is not only how to fulfill the basic needs of the people but also how to empower the conducive interaction and relationship among them. For this reason, democracy takes freedom and justice to be the basic ideal for living together. Freedom and justice will grow the personal responsibility in a society. This essay is an attempt to revive the importance and the essence of a democratic system in our society nowadays.

Kata-kata Kunci:

Demokrasi, Kesejahteraan Bersama, kebebasan, keadilan.

Pendahuluan

Bergolaknya negara-negara Timur Tengah melahirkan berbagai pertanyaan seputar situasi kemasyarakatan dari sudut pandang sosial-politik. Pertanyaan itu tentu bernuansa etika sosial politik: apa atau masalah apa yang menjadi pemicu sehingga masyarakat Timur Tengah yang terlihat mapan (*benestante*) seperti terusik dan menjadi sadar akan keberadaan dirinya sebagai anak bangsa. Mengapa demikian? Bagaimana bisa terjadi pergolakan itu? Salah satu benang merah yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah munculnya kesadaran bahwa pemerintahan yang benar haruslah pemerintahan yang datang dari, oleh dan untuk rakyat. Kesadaran itu membawa muatan tentang kebebasan manusia. Manusia itu hakekatnya bebas. Manusia tidak boleh dipasung dalam sebuah pemerintahan yang tirani. Pemerintahan yang demokratis mengenal ruang dan waktu. Pemerintahan yang baik setia pada komitmennya untuk menyejahterakan rakyatnya (*bonum commune*). Pemerintah adalah pelayan rakyatnya. Tulisan di bawah ini adalah ulasan singkat mengenai situasi sosial kemasyarakatan dari segi pandangan teologi politik. Ulasan ini lebih bersifat penyadaran akan pentingnya melihat masalah sosial-politik di tengah masyarakat kita.

Diskusi mengenai etika sosial-politik sejauh ini memperlihatkan bahwa paham etika selalu mengandung empat tuntutan moral yang penting. *Pertama*, tuntutan demokrasi yang bermaksud memberikan situasi yang aktual pada prinsip-prinsip partisipatif dan representatif dalam sebuah sistem pemerintahan yang aktual. *Kedua* tuntutan *common good* sebagai bentuk penyempurnaan manusia sehingga setiap orang dapat memperkembangkan seluruh kemampuannya dalam kerja sama dengan individu yang lain dalam lingkup masyarakat dan komunitas tertentu. *Ketiga*, tuntutan kebebasan untuk menentukan diri sendiri sekaligus indepedensi terhadap orang lain. *Keempat*, tuntutan keadilan sosial untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan memperlakukan sesama manusia tanpa diskriminasi dalam segala situasi.

Dalam perspektif etika, keempat unsur di atas berbicara mengenai kebaikan hubungan antar manusia secara personal yang bertujuan menjamin terwujudnya pemahaman manusia mengenai apa yang diyakini sebagai baik-jahat (konsep moral yang paling dasariah), dalam sebuah relasi yang terbangun baik untuk tingkat relasi individu, sesama dan negara. Pengertian ini akan menempatkan etika sosial-politik sebagai keutamaan (*virtue*) yang utuh dan lengkap karena ia tidak hanya berbicara mengenai kebaikan bagi orang tertentu melainkan juga menuntut agar kebaikan itu diberlakukan bagi orang lain.

Dengan ekspresi "etika" mau dikatakan tentang suatu bentuk spesifik terhadap bagaimana menghidupi dan memformulasikan moral dalam masyarakat sipil dan pluralistik. Maka etika memang pada dasarnya merupakan suatu moralitas sosial-politik yang memberi perhatian pada terciptanya secara moral suatu relasi yang saling menguntungkan bagi segenap warga masyarakat. Etika akan melahirkan tanggungjawab personal dan sosial dalam menjalankan aktivitas hidup bernegara[1].

1. Pentingnya Etika Sosial-Politik

Per definisi, etika memperkenalkan diri sebagai pencapaian dari antinomi yang nampak antara moral religius dan moral sipil (awam) dan sebagai proyek unifikasi dan konvergensi dalam pluralisme moral yang legitim dalam masyarakat demokratis. Etika sebagai sebuah kajian kritis atas apa yang baik dan apa yang jahat menempatkan rasio manusia sebagai dasar argumentasinya untuk membangun suatu masyarakat yang berguyub rukun. Maka etika menolak sesuatu yang bersifat non-rasional.[2] Karena menekankan soal rasio sebagai dasar penilaian, etika selalu bersifat empiris. Ia mendasarkan diri pada suatu observasi atas fakta atau pengalaman-pengalaman hidup untuk merumuskan norma-norma atau hukum-hukum untuk dipakai bagi fakta atau pengalaman itu.[3]

Etika mengandung, pada tempat pertama, "adanya pengakuan terhadap kehidupan sosial."[4] Namun pengakuan sosial dan politik adalah dua dimensi yang saling menutup diri satu sama lain. Yang pertama memberi keaslian terhadap

justifikasi unik dan total terhadap realitas yang menutup diri terhadap justifikasi eventual dan yang lain menempatkannya dalam cara yang irrasional. Kondisi sosial akan mengakui eksistensi dari pluralisme dari proyek-proyek hidup manusia. Ia menerima perbedaan dan mengakuinya sebagai dasar keberadaan suatu himpunan sosial. Dari sini dapat dimengerti bahwa himpunan sosial itu harus bisa hidup berkawan.[5] Sementara politik akan mentrasformasikan orang dalam 'kepercayaan' dan penilaian terhadap 'dogma'. Ia tidak pernah bertoleransi terhadap eksistensi dari suatu justifikasi rasional dan bukan dogmatis. Bahkan ia cenderung diktatoris, terjadi pemaksaan kehendak agar diikuti oleh orang lain.

Dengan pengertian seperti di atas, konsep etika dengan sendirinya membawa beberapa tuntutan untuk penataan politik secara sosial. Tuntutan itu tentu terutama sesuai dengan semangat dasar demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai batu penjuru tegaknya masyarakat yang tertata baik, dimana setiap orang tidak melulu menuntut haknya tetapi sekaligus bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban. Meminjam istilah Rawls, inilah yang disebut sebagai *the natural duty of being just*[6]. Artinya kewajiban bersikap adil dan bertindak etis merupakan keharusan bagi manusia sebagai makhluk moral. Tuntutan itu dilakukan bukan untuk mendapat sesuatu melainkan karena tuntutannya memang demikian. Atas dasar itu, etika sosial politik membenarkan adanya hak politik seperti hak atas partisipasi politik (*right to equal political participation*), hak untuk tidak patuh (*right to civil disobedience*), dan hak untuk menolak keputusan politik yang bertentangan dengan hati nuraninya (*right to conscientious refusal*).[7] Di samping itu, konsep etika sosial-politik juga menuntut bahwa setiap anggota masyarakat harus bersedia memikul beban kewajiban dan tanggung jawab untuk mematuhi konstitusi karena dengan konstitusi hak setiap orang dilindungi dan dijamin pelaksanaannya secara pasti.

2. Dasar Etika Sosial Politik

Seperti sudah disebutkan di atas masyarakat adalah sekelompok individu manusia yang mempunyai hubungan saling tergantung satu sama lain dan memiliki kepentingan bersama serta memiliki budaya. Sosiologi, sebagai sebuah ilmu, hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang terbangun dalam komunitas tertentu. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Teori sosiologis hanya dapat diterapkan dalam suatu masyarakat majemuk. Itu berarti bahwa sebuah masyarakat tunduk pada peraturan atau hukum yang berlaku dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat itu.

Demokrasi kontemporer bermaksud menumbuhkan fungsi aktivitas pemerintahan, untuk memimpin pemerintahannya dengan peraturan formal demi kebaikan bersama dari seluruh komunitas dan secara khusus mereka yang lemah

dan miskin. Perubahan-perubahan struktural yang ada, baik dari segi administratif maupun dalam inisiatif legislatif, bertemu dan ada dalam negara demokrasi bahkan masuk sebagai finalitas sosial yang mengkarakterkan negara tersebut.

Di beberapa negara Timur Tengah, kekuatan pembaharuan dari demokrasi sekarang sedang berkembang cukup positif namun di beberapa negara lain, seperti Indonesia, terkesan adanya ketinggalan pembaharuan pada tingkat transformasi demokrasi yang efektif dari formalitas substansial dan dari politik sosial terhadap prinsip partisipatif. Cita-cita sebuah demokrasi yang adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat larut di dalam prinsip rapresentatif-partisipatif. Rakyat yang seharusnya dapat menentukan kebijakan bersama dipasung oleh wakilnya yang harus setia dan patuh pada *policy* partainya. Kasus-kasus *recall* atas beberapa anggota partai adalah contoh kasus untuk menegaskan hal itu. Karenanya terkesan bahwa substansi demokrasi dan kedaulatan rakyat bersifat "mitos" dan utopia, yang secara historis tidak dapat dicapai dan hanya memberi stimulus pada level idealisme[8]. Pada gilirannya, mitos dan utopia itu akan menempatkan kekuasaan pada manipulasi bahwa mereka yang bekerja pada titik sentral kekuasaan yang bersifat kultis dan oligarki teknokratis sehingga mampu mengontrol titik pusat kekuasaan yang birokratis dan mengontrol pula proses pengerahan (sosialisasi) massa demi kepentingan politiknya.

Maka banyak orang menjadi skeptis bahwa demokrasi dewasa ini hanyalah bersifat "formal" karena model kontinental (eropa) menurunkan dan mengkontaminasikan partisipasi efektif dari seluruh masyarakat. Karenanya seharusnya orang merasa malu untuk menyebutkan lagi supremasi rakyat karena hanya orang tertentu saja yang mengelola kebijakan publik. Sistem representatif menjadi hilang karena sistem pemilihan (pungutan suara) direduksi hanya dengan memilih para elite politik. Ia bukan lagi wakil dari rakyat melainkan wakil partai yang dianutnya.

Secara etis, pentinglah berjuang untuk memperluas prinsip partisipasi yang demokratis pada semua level dan membuka kanal-kanal baru yang mendukung kelompok-kelompok untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam berpolitik. Seluruh realisasi dari proses demokratis harus mengandung kondisi fundamental suatu pendidikan permanen terhadap demokrasi.

Untuk maksud di atas, politik tidak boleh mematikan massa yang majemuk dan membenamkan diri sendiri di dalam individualisme yang tidak koheren atau dalam eksklusivisme partai. Politik harus membuat kesadaran (suara hati) akan kebutuhan negara (sebagai kebutuhan bersama), yang dapat dianggap sebagai kehendak Tuhan (*vox populi vox dei*), yang tentu saja merupakan legitimasi fungsional yang menopang kekuasaan yang benar dan mengambil bagian dalam otoritas Tuhan sendiri. Maka dibutuhkan keutamaan sosial di mana orang saling membuka diri untuk bersama mencari jalan terbaik demi menciptakan kesejahteraan bersama. Keutamaan itu akan memberi ruang gerak kepada tanggungjawab sosial. Setiap orang bertanggungjawab atas dinamika di dalam komunitas tempat ia hidup.

Satu hal lain lagi yang juga penting dari sudut etika adalah jaminan konstitusional yang kuat atas kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berserikat, termasuk pula kebebasan untuk hadirnya "kelompok oposisi" dalam masyarakat. Bahkan etika sosial-politik menuntut keterbukaan untuk menerima pihak-pihak yang berbeda pendapat yang juga bisa jadi bahwa perbedaan itu mengerucut dalam bentuk oposisi politik. Semuanya ini merupakan "keutamaan" yang memberi ruang gerak kepada rasa tanggung jawab. Dalam satu kata, semua keutamaan etis ini, sudah sejak para pemikir demokrasi modern yang terkenal, sejak Locke hingga Tocqueville, menyebutnya sebagai "kasih terhadap republik" (*amore della republica*). Himbauan terhadap etika demokratis ini dan terhadap kasih ini adalah nilai fundamental yang memberi substansi terhadap *common good*. Etika sosial-politik harus memberi ruang gerak terhadap kebutuhan yuridis dan institusional yang pada gilirannya memberi ruang gerak kepada kebebasan dan partisipasi demokratis yang efektif. Tanpa keutamaan, tidak akan ada pencaharian akan nilai-nilai etis. Tanpa suatu pencaharian terhadap yang baik, yang benar dan indah, sebuah demokrasi tidak hidup tetapi mengambang di dalam dirinya sendiri (tinggal di dalam dirinya sendiri), siap untuk diatur oleh suatu penguasa yang lalim.

3. Tujuan Etika Sosial Politk

Kesejateraan bersama (*common good*) adalah suatu konsep sosiologis yang memberi isi metapolitik untuk menerangi struktur negara demokrasi. Pada dasarnya kesejahteraan bersama adalah tujuan dari setiap orang yang hidup di dalam suatu komunitas: tujuan dari kebersamaan tertentu dan tujuan dari setiap individu bila ia mau bergabung. Tujuan itu merupakan tujuan obyektif dan intrinsik dari kehidupan sosial. Seandainya semua manusia bersatu di dalam suatu masyarakat maka mereka harus sadar akan kebutuhan-kebutuhan mereka dan bekerja sama serta pada saat yang sama memperoleh 'rahmat' (keuntungan) yang dapat mereka terima dari persatuannya itu. Kesejahteraan bersama adalah hasil dari aktivitas persatuan itu, yang merupakan norma tertinggi yang memimpin masyarakat itu untuk tinggal bersama. Konkritnya, kesejahteraan bersama mengidentifikasi diri dengan kebersamaan yang menjadi tali pengikat masyarakat itu dan menjadi unsur pembangun yang integral yang sekaligus menyempurnakan setiap anggota di dalam komunitas itu. Karena itu ada banyak moralis yang mengartikan kesejahteraan bersama sebagai kebaikan bersama untuk menekankan interaksi yang dinamis dari anggota-anggota komunitas.

Kesejahteraan bersama mempunyai suatu keaslian yang muncul dari komunitas itu sendiri. Walaupun dibentuk dan dihidupi dari kesejahteraan partikular namun ia tidak diidentikkan dengan kesejahteraan dari setiap pribadi, tidak juga dari jumlah atau dari kombinasi keinginan dari kesejahteraan tiap individu, tetapi ia adalah suatu keseluruhan hidup dan dinamika yang terpancar dari koordinasi yang

harmonis dari aktivitas dan fungsi sosial dari seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat itu.

Di bawah aspek metafisik, kesejahteraan bersama merupakan bentuk perwujudan yang unggul dari "kebaikan". Walaupun diterjemahkan ke dalam pemahaman yang biasa konsep kesehateraan bersama pasti selalu sampai pada kesimpulan bahwa ia absolut ada demi penyempurnaan komunitas itu baik pada level kesejahteraan metafisik yang diaktualkan di dalam kehidupan sosial dalam forma historis seperti, keadilan, hukum dan kedamaian yang membantu pembangunan integrasi di dalam kelompok itu mapun pada level forma politik di mana semua orang mengambil bagian di dalam menentukan masa depan bersama sebagai anggota komunitas.[9]

Menurut etika, hubungan individu-masyarakat ditemukan sebagai elemen esensial di dalam konsep Kesejahteraan Bersama yang memasukkan sosialitas sebagai kondisi dan kekayaan yang dibawa oleh setiap orang, sebagai kemampuan untuk keluar dari dirinya sendiri untuk bertemu dengan orang lain, keinginan untuk bekerjasama, keinginan untuk hidup bersama, memberi kontribusi terhadap perkembangan kekayaan kultur dan masyarakat, yang menjamin kesejahteraan setiap dan semua orang. Karena itu kesejahteraan bersama berlawanan dengan sikap individualistis, egosentris dan antisosial. Demikian juga setiap forma kolektivisme, totalitarisme sosial khususnya kekuasaan mutlak negara yang menekan seseorang, menekankan perkembangan otonomis seseorang, yang tentu saja berlawanan dengan kebebasan yang merupakan akar dari martabat manusia.[10]

Ukuran dari kesejahteraan bersama adalah penyempurnaan manusia sehingga setiap orang dapat memperkembangkan seluruh kemampuannya dalam kerjasama dengan individu yang lain dalam lingkup masyarakat dan komunitas itu. Penyempurnaan manusia adalah elemen dasariah dari kesejahteraan bersama yang dipandang sebagai norma konkrit dan obyektif dari relasi-relasi antar manusia di dalam masyarakat itu sehingga boleh disebut juga sebagai "keharusan keberadaan"nya yang merupakan ukuran dari kehidupan sosial-politik di mana suatu masyarakat dipanggil untuk mempromosikannya dalam setiap situasi sosiokultural. Kesejahteraan bersama mengimplikasikan juga seluruh kebersamaan dari inisiatif sosioekonomi yang diambil dari masyarakat. Penyempurnaan manusia merupakan juga suatu disiplin yang menjamin aktivitas setiap orang, bukan untuk mematikan melainkan untuk menghidupi dan mengarahkannya pada kerjasama menurut program pembangunan yang menopang, mengarahkan dan menjamin seluruh kekuatan kreatif dari masyarakat itu demi kesejahteraan bersama.

Kesejahteraan bersama dibicarakan secara panjang lebar pada pertengahan abad XVIII oleh teori ekonomi liberal yang merupakan aset dasar dari setiap orang dan kekayaan pribadinya sebagai rahmat dari "imannya" yang optimistis terhadap praktek hidupnya yang positif[11] dalam fungsinya bagi kekayaan sosial (fungsi

sosial dari kekayaan, yakni disumbangkan kepada masyarakat tempat ia hidup sebagai tanda ia berpartisipasi terhadap Kesejahteraan Bersama). Doktrin *laissez-faire* memikirkan kebebasan inisiatif sebagai satu-satunya jalan dari kesejahteraan sosial (konsepnya dihubungkan dengan produksi). Atas dasar itu, kesejahteraan (kekayaan) sosial dipahami sebagai penggabungan dari berbagai macam kekuatan pribadi untuk menaikkan komoditas dan kekayaan masyarakat itu. Bahkan kesejahteraan bersama dapat merealisasikan diri sebagai intervensi dari "sesuatu yang tidak kelihatan" (Adam Smith). Maka Bethan mendefinisikan kesejahteraan bersama sebagai jumlah (kebersamaan) dari kesejahteraan dari setiap anggotanya dan jumlah itu menyumbang terhadap komunitasnya sebagai satu-satunya tujuan yang melindungi hak dan praktek kebebasan personal.[12]

Bagi Marx, kita tidak dapat berbicara tentang masalah kesejahteraan bersama kalau di dalamnya tidak ada identifikasi terhadap kesejahteraan dari setiap orang. Manusia mampu menjadi baik (sejahtera) kalau memiliki mentalitas yang sama seperti yang dimiliki oleh komunitas yang merupakan konkritisasi dari setiap orang yang bekerja sama. Karena itu manusia dipahami dalam keberadaannya sebagai makhluk yang mampu melengkapi kebutuhan-kebutuhannya sendiri sebagai konsekuensi terhadap masyarakat, yakni dengan menempatkan setiap orang dalam kapasitasnya sebagai makhluk hidup, sambil mengeliminasi setiap kesejahteraan individual sebagai faktor diskriminatif dan menggantikannya dengan kesejahteraan sosial sebagai kesejahteraan (kebaikan) dari setiap orang-komunitas, manusia dalam kapasitasnya sebagai anggota komunitas.

Dalam komunitas, tentu saja hukum mempunyai tujuan untuk mengarahkan setiap orang pada kesejahteraan bersama. Sambil mengatur tindakan manusia terhadap kebahagiaan bersama, hukum harus merealisasikan diri di dalam kondisi yang terbatas dalam ruang dan waktu, di dalam budaya dst., di mana hukum sebagai partisipasi terhadap hukum kodrat (hukum alam), mengatur dan mengarahkan tindakan setiap manusia kepada keadilan dan kedamaian yang merupakan komponen dasar dari kesejahteraan politik. Hukum kodrat dimengerti sebagai hukum yang paling dasariah karena mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan menghindari yang jahat. Hukum-hukum positif mengalir dari hukum kodrat. Tujuan hukum-hukum itu adalah mengatur manusia dan sekaligus menjamin tercapainya kesejahteraan bersama.

Kesejahteraan bersama mengimplikasikan dan menuntut penghargaan akan martabat manusia dan karena itu mempromosikan penghidupan yang maksimal terhadap totalitas nilai-nilai manusiawi yang mengalir dari keberadaannya sebagai manusia. Totalitas ini tidak mereduksi diri hanya pada suatu kebersamaan keuntungan dan kekayaan tetapi mengimplikasikan suatu integritas sosiologis dari nilai: suara hati, keutamaan politis, hukum dan kebebasan, kegiatan semua anggotanya, kekayaan spiritual, ketahanan moral, keadilan, heroisme di dalam kehidupan individual dan dalam hubungan dengan semua anggota di dalam

masyarakat itu. Negara diarahkan (diatur) dan ditempatkan di bawah kesejahteraan bersama dan dari prinsip ini seluruh inspirasi dan kegiatan hidupnya berlangsung.

4. Dua Pilar Etika Sosial-Politik

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa prinsip partisipasi politik menuntut semua pihak untuk mendapat peluang yang sama dalam mendapatkan kedudukan dan kekuasaan publik. Penekanan prinsip ini dimaksudkan agar kebebasan sebagai prinsip etis (*the worth of freedom*) perlu mendapat tempat yang semestinya. Keadilan sebagai *fairness* tidak pernah akan menjadi kenyataan kalau nilai kebebasan politik tidak sama untuk semuanya. Memang *fairness* berlaku sesuai dengan talenta dan kemampuan setiap orang namun akses politik harus tersedia dan terbuka bagi semua orang. Secara etis, hal itu perlu karena *fairness* akan memandang dan memahami situasi seseorang berangkat cara pandangnya sendiri mengenai apa yang baik dan bernilai. Di sisi lain, *fairness* akan menghargai kesediaan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya berkenaan dengan apa yang baik dan benar.

Gagasan dasar di belakang sistem demokrasi adalah tuntutan kebebasan dan keadilan namun bisa jadi terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Setiap orang adalah pribadi yang unik. Perbedaan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, keyakinan moral dan religius serta pandangan filosofis-budaya tentu akan mewarnai setiap pengalaman hidup bersama. Namun iklim demokrasi akan membuka peluang bagi terjadinya pertukaran gagasan dan pendapat. Pertukaran itu harus dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan yang konstruktif.

Dua kekuatan dasar yang menjadi kekuatan sosial-politik dalam sebuah masyarakat. Kedua kekuatan itu adalah: kebebasan dan keadilan.

Kebebasan. Kebebasan tidak pernah dimengerti sebagai kesewenang-wenangan untuk berbuat apa saja sesuka hati melainkan dipahami sebagai "tanda yang mulia gambar Allah dalam diri manusia. sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri supaya ia dengan suka rela mencari Penciptanya dan dengan mengabdi kepadaNya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan" (GS 17). Kebebasan menandakan bahwa seseorang itu otonom. Ia menjadi manusia karena ia bebas. Dimensi ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh para skolastik. Kebebasan adalah: tidak terikat pada sesuatupun (bebas dari) dan untuk mengembangkan dirinya sendiri (bebas untuk), yakni manusia menjadi aktif untuk membuat sesuatu keputusan atau membuat sesuatu demi perwujudan dirinya.[13] Kebebasan adalah otonomi seseorang untuk berkembang dan menyempurnakan diri di dalam kebersamaan hidup dengan yang lain.

Dalam hubungannya dengan sesama, manusia memberikan dirinya secara bebas. Hegel mendefinisikan kebebasan sebagai kemampuan manusia untuk

menjadi dirinya sendiri dalam hubungannya dengan sesama. Namun kebebasan mempunyai "hukum utama", yakni: ia tidak pernah membatasi manusia untuk bertemu dengan yang lain. Kebebasan membebaskan manusia untuk bertemu dengan yang lain dan mereka saling mengenalkan kebebasan satu sama lain. Kebebasan akan mempertemukan setiap orang menjadi "kita" di dalam setiap relasi yang dibuat manusia.[14]

Tuntutan etis yang menjadi keharusan dari kebebasan modern sebuah masyarakat demokratis yang dimulai sejak revolusi Perancis di mana perjuangan kebebasan, persamaan dan persaudaraan (*Liberté, Egalité, Fraternité*) ingin menempatkan kedauladan rakyat (*the sovereignty of the people*) di atas segala-galanya. Maka tidak dibenarkan jika perkembangan itu menempuh jalan kebalikan dari cita-cita luhur tersebut. Kebebasan rakyat tidak boleh dirampas dan tidak boleh berada pada instansi manapun.[15] Setiap orang harus merasa bebas untuk mengembangkan dirinya, kehendaknya dan menghadirkan dirinya dengan kemandirian dan otonomi dirinya. Tak boleh ada alienasi atau pemaksaan terhadap orang tertentu.

Keadilan. Keadilan hanya bisa diterapkan di dalam suatu masyarakat demokratis sebab sistem demokratis akan menghargai setiap pribadi sebagai makhluk moral dan rasional yang memiliki kebebasan dan tanggungjawab atas dirinya sendiri.

Dari segi etika, keadilan tidak pernah hanya dipikirkan sebagai keadilan individual. Keadilan selalu bernuansa sosial. Artinya orang berpikir tentang kewajiban masing-masing orang untuk berlaku adil terhadap sesamanya dengan memberikan apa yang menjadi haknya dan memperlakukan sesama sebagai rekan manusia tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama. Jadi keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak baik dari individu-individu yang terlibat langsung dalam hubungan sosial tertentu melainkan tergantung dari struktur-struktur sosial-politik masyarakat seluruhnya.[16] Struktur-struktur itu sedemikian rupa harus menjamin setiap anggota masyarakat agar mereka mempunyai kemungkinan yang optimal mungkin untuk memperoleh apa yang menjadi haknya serta untuk mendapatkan bagian yang wajar dari harta benda masyarakat secara keseluruhan[17].

Ukuran etis pelaksanaan keadilan adalah penciptaan prasarana-prasarana kesejahteraan segenap anggota masyarakat, khususnya bagi mereka yang paling lemah dan miskin serta sekaligus memastikan bahwa kelompok tertentu tidak hidup seenaknya karena mereka menguasai sebagaian besar dari hasil kerja dan hak-hak orang-orang miskin.

Hal lain yang penting diperhatikan pula dalam soal keadilan adalah adanya pengakuan atas hak warga untuk mendengarkan dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Setiap anggota masyarakat sebagai warga negara akan memiliki ruang kebebasan yang bermakna untuk menentukan dirinya sendiri secara otonom. Adanya pengakuan dan jaminan pelaksanaan hak itu akan menjadi tanda yang

paling nyata atas pengakuan politis tentang keadilan sosial. Menjadikan hati nurani sebagai basis etika memang sangat penting. Namun mempercayakan pengaturan hubungan sosial melulu kepada hati nurani setiap orang sesungguhnya telalu naif dan kurang efektif untuk menggerakan kerja sama sosial. Untuk itu dibutuhkan peraturan hukum yang dibentuk dalam iklim *fairness*. Peraturan hukum itu merupakan jalan yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan karena dapat mengamankan dan memberi garansi hak setiap orang.

5. Solusi Masalah: Pendidikan Politik

Pembicaraan mengenai moral dan etika akhir-akhir ini makin menguat karena munculnya fenomen kontraposisi antara realitas politik (politik praksis) dan teori politik.[18] "Politik itu indah karena menjadi ajang bersama untuk menetukan kebijakkan seolah-olah tidak mempunyai gema apapun pada tataran praksis. Orang saling "memakan", mencari pembenaran dirinya sendiri, dan menguatnya politik partai dst., semakin memperlihatkan bahwa memang "politik itu kotor". Apalagi sistem multi partai, seperti yang terjadi di Indonesia, sangat memungkinkan terjadinya konflik kepentingan partai turut bermain di dalamnya. "Tidak kawan dan lawan yang abadi" adalah ungkapan untuk melukiskan kuatnya pertarungan politik kepentingan di dalam pengambilan keputusan. Apa yang kurang sehingga ada *gap* antara teori dan realitas politik?

Salah satu jawaban atas pertanyaan di atas adalah kekurangan pendidikan politik[19]. Dengan pendidikan politik, masyarakat mendapat pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, lebih-lebih pengenalan akan nasionalisme, undang-undang, tradisi dan kekayaan budaya, sistem pemerintahan, hubungan dengan dunia internasional, keaktivan di dalam menentukan masa depan bersama, kesejahteraan bersama[20]. Jiwa dari seluruh pendidikan politik macam ini bermuara untuk mengaktifkan warga masyarakat agar mempunyai pengetahuan politik yang benar-benar membebaskan dan agar mempunyai kebebasan yang bertanggungjawab.

Bagi Konsili Vatikan II, pendidikan politik sangat penting bukan saja untuk membentuk pengetahuan politik tetapi lebih-lebih untuk membangun moralitas politik dari setiap warga negara. Bapa-bapa Konsili menulis, "Hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik... supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara.... Hendaknya mereka dengan keutuhan dan kepribadiannya dan kebijaksanaan menentang ketidakadilan dan penindasan, kekuasaan sewenang-wenang dan sikap tidak bertenggang rasa satu orang atau satu partai politik. Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang." (*GS* 75). Pengetahuan politik harus sejalan dengan pengetahuan moral sehingga cita-cita hidup bersama dapat tercapai. Pendidikan politik ini juga akan membuat warga negara menjadi subyek dan bukan

obyek politik sehingga masyarakat berperan aktif di dalam mewujudkan *welfare society* dan sekaligus interaksi yang kondusif antar warga dapat terjadi dengan baik. Jadi pendidikan politik sebetulnya adalah pemberdayaan masyarakat supaya lebih aktif di dalam hidup bermasyarakat.

Yang perlu diperhatikan di dalam pendidikan politik adalah: pemberdayaan masyarakat tidak pernah boleh menjadi pendidikan politik yang dilakukan oleh sebuah partai politik tertentu. Maksudnya pendidikan itu harus dilakukan oleh negara atau lembaga independen agar pendidikan itu tidak menjadi penyucian otak (*lavaggio del cervello*)[21] bagi masyarakat. Di sisi lain, ilmu-ilmu politik pun hendaknya membuat analisa yang tajam secara akademis di dalam pendidikan politik sehingga memperlihatkan adanya jurang antara teori dan praksis politik. Analisa itu bisa dipublikasikan agar publik tahu apa sesungguhnya yang terjadi.

Sejalan dengan ide pendidikan politik di atas, peran media massa juga perlu digalakkan. Dalam rangka pendidikan politik, media massa diharapkan dapat bersuara kritis sehingga dapat membangunkan opini publik untuk melawan segala bentuk penyelewengan kekuasaan, ketidakadilan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Media massa sangat dibutuhkan kehadirannya untuk menyuarakan suara kaum minoritas dan kaum tertindas. Ia dapat menjaga moralitas bangsa dengan mengawasi tindak-tanduk penguasa dalam mengambil tindakan publik supaya keputusan itu bukanlah upaya pembenaran diri atau usaha untuk melanggengkan kekuasaannya.

Penutup

Manusia terlahir sebagai *l'uomo politico* namun ia tidak secara otomatis memahami tindakan politik yang sesungguhnya[22]. Demokrasi adalah salah satu sistem negara yang berlandaskan persetujuan dalam sebuah konsensus bersama tentang pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat. Demokrasi akan memungkinkan manusia sebagai *l'uomo politico* agar aktif di dalam hidup bermasyarakat. Sistem ini sampai sekarang dianggap masih menjamin hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, keadilan dan kesejahteraan sosial.

Alam demokrasi harus memungkinkan adanya partisipasi masyarakat (*participatory society*)[23] di dalam membangun kesejahteraannya. Menurut moralitas kristiani, dua pilar utama, yakni kebebasan dan keadilan, harus mendapat tempat utama di dalam pelaksanaan negara. Setiap warga negara harus bebas agar ia dapat mengembangkan dirinya di dalam sebuah kebersamaan hidup dan sekaligus ia harus berlaku adil dan diperlakukan secara adil di dalam interaksi sosial. Setiap orang taat kepada negara tanpa menjadi budak dari negara. Demokrasi yang baik akan memberi peluang kepada semua orang, khususnya kaum miskin dan minoritas, untuk berpartisipasi di dalam menentukan masa depan bangsa. Di sisi lain, demokrasi selalu mengandaikan adanya pluralitas dalam hal masyarakat

(etnik), keyakinan, pendapat, pilihan, partai, dlsb. Semuanya itu dapat dipakai sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan hidup yang lebih interaktif dan integral. Inilah yang harus kita hidupi kembali di dalam membangun bangsa kita ini.

Mateus Mali

Dosen Teologi Moral di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Wisma Sang Penebus Nandan: malicssr@hotmail.com

Catatan Akhir

1 Marciano Vidal, *Manuale di etica teologica*. Vol III: *Morale sociale*, Cittadellà Editrice, Asissi 1997, 681.

2 Bdk. K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997, 37.

3 *Ibid*., 140.

4 Marciano Vidal, *Etica civile e società democratica*, Società editrice internazionale, Torino 1992, 6.

5 Sosial berasal dari kata socius, yang berarti kawan atau teman. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai relasi satu sama lain karena mempunyai kepentingan yang sama. Masyarakat selalu bersifat plural namun setiap individu di dalamnya harus bisa hidup berkawan dengan orang lain.

6 Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta 2001, 96

7 *Ibidem*.

8 Bdk., Marciano Vidal, *Manuale di etica*, 706-707.

9 Raimondo Spiazzi, *Principi di etica sociale*, Edizioni Studio Dominicano, Bologna 1989, 84.

10 *Ibid*., 45.

11 Kesejahteraan dianggap sebagai berkat yang diturunkan oleh Yang Ilahi karena hidup seseorang dianggap benar dan baik. Konsep tentang teologi sukses cukup kuat melatarbelakangi pemikiran seperti itu. Bekerja dipahami sebagai bentuk keikutsertaan seseorang dalam daya kreatif Allah. Kalau bekerja dengan baik pastilah Allah akan menurunkan berkatnya. Sebagai tanda syukur, orang dapat memberikan persepuluhan kepada sesamanya sebagai tanda keikutsertaannya dalam penciptaan kesejahteraan bersama.

12 Raimondo Spiazzi, *Principe di etica*, 47.

13 Mateus Mali, *Iman dalam Tindakan. Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani*, Kanisius, yogyakarta 2009, 107

14 *Ibidem*.

15 K. Bertens, *Etika*, 97.

16 Bdk., Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta 2001, 47.

17 *Ibid*., 48.

18 R. Nicolosi, "Uomo politico", dalam Francesco Compagnoni, Giannino, salvatore Privitera (a cura di), *Nuovo dizionario di teologia moral*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1990, 1408-1409.

19 Bernhard Häring, *Liberi e Fedeli in Cristo*..., 474-476.

20 *Ibid*., 474.

21 *Ibid*., 476.

22 R. Nicolosi, "Uomo politico"..., 1408.

23 Bernhard Häring, *Liberi e Fedeli in Cristo*..., 461.

Daftar Pustaka

AA.VV.,
1986 *Cristianesimo e potere*, EDB, Bologna.

Baechler, J.,
2001 *Demokrasi. Sebuah Tinjauan Analitis*, Terj. Bern. Hidayat, kanisius, Yogyakarta.

Bertens, K.,
1997 *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Danaher, K.,
2006 *Demokratisasi Perekonomian Golbal*, Cindelaras Pustaka rakyat Cerdas, Yogyakarta.

Magnis-Suseno, F.,
2001 *Kuasa dan Moral*, Gramedia, Jakarta.

Mali, M.
2009 "Demokrasi Pancasila: Sebuah Narasi Persaudaraan", dalam Mateus Mali (Ed), *Perjumpaan Pancasila dan Kristianitas. Reposisi Relasi Negara dan Agama dalam Masyarakat Plural*, Komisi Teologi KWI – Penerbit Lamalera, Jakarta – Yogyakarta.

____,
2009 *Iman dalam Tindakan. Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani*, Kanisius, yogyakarta.

Spiazzi, R.,
1989 *Principi di etica sociale*, Edizioni Studio Dominicano, Bologna.

_____,
1989 *Lineamenti di etica sociale*, Edizioni Studio Dominicano, Bologna.

Ujan, A. A.,
2001 *Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta.

Vidal, M.,
1992 *Etica civile e società democratica*, Società editrice internazionale, Torino.

_____,
1997 *Manuale di etica teologica*. Vol III: Morale sociale, Cittadellà Editrice, Asissi.